

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN PESISIR PADA DESA WAIHERU KECAMATAN BAGUALA KOTA AMBON

Oleh:

La Madjid¹⁾

Email: madjidalmazka75@yahoo.com

Abstrak

Pengembangan wilayah pesisir dan kelautan sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi saat ini, mengingat potensi kelautan yang ada belum dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan pesisir. Aktivitas ekonomi pada sektor ini masih belum dikelola secara professional sehingga dilihat masih dominannya aktivitas penangkapan ikan dan seluruh mata rantai kegiatannya dilakukan oleh nelayan pesisir bersifat tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran mengenai implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.

Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya upaya yang dilakukan pemerintah terkait 4 indikator-indikator yang menjadi focus yakni peningkatan sumber daya, pengembangan kelompok, penyediaan informasi dan pengembangan usaha produk terhadap implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir dengan berbagai kekurangan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Nelayan Pesisir

A. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan sumberdaya potensial di Indonesia dimana merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, sumberdaya ini sangat besar dukungannya dimana terdapat garis pantai di seluruh Indonesia dan tentu menyimpan sumber daya alam yang besar, diantaranya potensi hayati dan non hayati. Olehnya itu pengembangan wilayah pesisir dan kelautan sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi saat ini, mengingat potensi kelautan yang ada belum dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan pesisir, aktivitas ekonomi pada sektor ini masih belum dikelola secara professional sehingga dilihat masih dominannya aktivitas penangkapan ikan dan seluruh mata rantai kegiatannya dilakukan oleh nelayan pesisir bersifat tradisional.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan menurut Mulyadi (2007:07) mengatakan bahwa nelayan adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya.

¹⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon

Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa masyarakat pesisir yang kebanyakan terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil laut, dan masyarakat lainnya yang secara umum kehidupan sosial ekonominya sangat tergantung pada sumberdaya kelautan. Seharusnya nelayan pesisir merupakan masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar tapi pada kenyataannya sebagian besar nelayan pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal termasuk pada nelayan pesisir di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.

Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan yang berakar pada tingginya aspek ketergantungan nelayan terhadap kegiatan usaha melaut dan keterampilan penangkapan nelayan yang masih rendah. Menurut Kusnadi (2009:19) mengatakan bahwa sebab-sebab kemiskinan nelayan tersebut antara lain : keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi laut dan gaya hidup yang dipandang “boros” sehingga kurang berorientasi ke masa depan, sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca panen, kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun sehingga akan mengganggu konsistensi perolehan pendapatan nelayan.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa kemiskinan nelayan tersebut diperlihatkan dengan rendahnya pendapatan nelayan, sehingga mereka masih mengalami kesulitan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan tingkat pendidikan yang layak. Juga permasalahan utama pada wilayah pesisir adalah lemahnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan pengembangan kelautan di wilayah pesisir. Karena itu pentingnya implementasi program pemberdayaan dalam mewujudkan kemandirian nelayan pesisir sehingga mampu menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya, selain itu implementasi program pemberdayaan yang dilakukan harus melibatkan nelayan pesisir sebagai aktor utama pada program pemberdayaan nelayan termasuk pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.

Implementasi program pemberdayaan haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi sesama daerah pesisir lainnya. Implementasi program pemberdayaan merupakan upaya untuk menggali kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Implementasi program pemberdayaan mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat khususnya nelayan pesisir yang bukan hanya meliputi penguatan individu atau

kelompok nelayan tetapi juga pranata-pranata sosialnya termasuk pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.

Namun jika dicermati langsung dilapangan, dijumpai kurangnya implementasi program pemberdayaan sehingga berdampak pada tingkat kebutuhan dan kesejahteraan nelayan pesisir. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan belum optimalnya implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir yang tampak terlihat berupa : tertinggal secara ekonomi dan sosial khususnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, sebagian besar nelayan pesisir tinggal di pemukiman kumuh dengan lingkungan yang kurang bersih dan sehat, tingkat pendapatan nelayan pesisir tidak stabil, dan disebabkan kondisi kapal nelayan pesisir mengalami kerusakan sehingga tidak dapat melakukan aktivitasnya. Hal ini tersebut tentu dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan pesisir sehingga perlunya perhatian pemerintah dalam rangka menyediakan berbagai program pemberdayaan guna mewujudkan kesejahteraan nelayan pesisir.

Disisi lain, tampak pula pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon, fenomena-fenomena mengenai belum optimalnya implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir yang terlihat berupa :

1. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki nelayan pesisir
2. Rendahnya kemampuan pengembangan usaha nelayan pesisir
3. Kurangnya pemasaran hasil tangkapan pada nelayan pesisir
4. Kurangnya program pemberdayaan yang memihak pada nelayan pesisir

Dengan demikian kajian mengenai fenomena – fenomena tersebut diatas, merupakan hal penting yang harus dilakukan agar dapat memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai realitas sebenarnya dibalik fenomena-fenomena tersebut dengan judul : **“Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Pesisir Pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon”**.

B. PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN

B.1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Pesisir Pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon”?.? dengan fokus perhatian penelitian ini adalah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelompok, penyediaan informasi dan pengembangan usaha produk yang dilakukan oleh nelayan pesisir pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.

B.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran mengenai implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.

C. TINJAUAN TEORITIS

C.1. Pengertian Program

Program merupakan tahapan dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan

¹⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon

merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Menurut Farida (2008) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan (2006:2) mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

C.2. Pengertian Implementasi

Secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Menurut Nurdin Usman (2002:20) mengatakan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Selain itu, menurut Jones dalam Widodo (2014:86) merumuskan batasan implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*” (sebuah proses untuk mendapatkan sumber tambahan sehingga bisa mengetahui apa yang seharusnya dilakukan). Dari rumusan tersebut maka dalam implementasi memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yaitu : (a) tindakan yang akan dilakukan, (b) melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Van Mater dan Horn dalam Sadhana (2013:175) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Selanjutnya, menurut Guntur Setiawan (2004:39) mengatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan

¹⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Agustino, (2014:139) mengatakan bahwa implementasi kebijakan menjelaskan menyangkut tiga hal yaitu :

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan ;
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
- c. Adanya hasil kegiatan.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Disamping itu, menurut Wahab (2014:133) mengatakan bahwa implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang di kehendaki.

Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana implementasi atau implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran itu sendiri.

C.3. Model-Model Implementasi

Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan dalam dua pendekatan yang dapat digunakan dalam implementasi yaitu pendekatan model *top down* dan *bottom up*. Namun mengenai implementasi program lebih cenderung menggunakan pendekatan model *top down*, karena dianggap lebih efektif terhadap pelaksanaan program. Hal ini dapat dari pendapat para ahli menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sadhana (2013:214) mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor kebijakan dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b. Karakteristik agen pelaksanaan/implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- d. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana.

Selain itu, menurut George C. Edwar III dalam Agustino (2014:149) menamakan model implementasi kebijakan dengan *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang ditetjemahkan terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (a) Komunikasi, (a) Sumber daya, (a) Disposisi, dan (a) Struktur birokrasi. Adapun model implementasi tersebut dapat dijelaskan melalui variabel-variabel yang terlihat dibawah ini;

1. Komunikasi adalah sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan.
2. Sumberdaya adalah yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen yaitu ; (a) staf, (b) informasi, (c) wewenang dan (d) fasilitas.
3. Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan mengenai pelaksana suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksanaan suatu kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan.
4. Struktur birokrasi adalah yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implemementasi kebijakan.

Selanjutnya, menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Sadhana (2013:219) mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan, sebagaimana pendapat mereka “*implementation is the carrying out of basic policy decision, usuallly incorporated in a statute but wich can also take the from of important executives orders or caourt decision identifies the problem’s to be pursued, and in a vaiety of ways, structures the implementation process*”. Adapun model implementasi ini dapat diklasifikasikan dalam tiga variabel yaitu ;

- a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- b. Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indiktor kejelasan dan konsistensi tujuan.
- c. Yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Dengan demikian dari beberapa model implementasi tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa model implementasi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program yang itu model *top down* yang dianggap dapat menyentuh dan menganalisis implementasi program baik dari aspek isi kebijakan dan implementasi terhadap berbagai program.

C.4. Implementasi Program

Implementasi program atau kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut Riggs (2005:54) mengatakan bawah program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur

¹⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon

ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Selain itu, menurut Ratmiko (2005:4) mengatakan bahwa guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan. Sedangkan menurut Kertonegoro (2004) mengatakan bahwa efektivitas implementasi program yang ditawarkan terdapat empat (4) faktor dalam melaksanakan suatu kebijakan yakni : komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya. Dengan demikian implementasi program adalah suatu kegiatan penerapan ide maupun gagasan dalam bentuk tindakan ataupun kegiatan, sehingga memberikan perubahan baik, dari segi afektif, kognitif dan psikomotorik bagi pelaksana kegiatan tersebut.

D. Konsep Pemberdayaan Nelayan Pesisir

D.1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu suatu proses pembangunan yang mana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai proses aktivitas sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi pada diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat tersebut ikut serta dalam berpartisipasi. Menurut Mardikanto dkk, (2013:28) mengatakan bahwa istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaan, aktivitas sosial.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan mengurangi kemiskinan agar tidak memperlakukan masyarakat miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan akan tetapi memberdayakan masyarakat miskin untuk berupaya keluar dari masalah kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Selanjutnya, menurut Nasdian (2014:96) mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya menumbuhkan peran serta dan kemandirian hingga masyarakat baik di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh

¹⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon

lebih baik dari sebelumnya, memiliki akses pada sumber daya, memiliki kesadaran krisis maupun melakukan pengorganisasian dan kontrol sosial dari segala aktivitas pembangunan yang dilakukan dilingkungannya.

Dengan demikian dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai program atau kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

D.2. Tujuan dan Sasaran pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk lebih membuat masyarakat lebih mandiri, berwawasan luas, membuat masyarakat memiliki kemampuan keterampilan yang bagus sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk membuat usaha atau bekerja. Menurut Sulistiyani (2004:80) mengatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Selain itu, menurut Theresia dkk, (2015:153) mengatakan bahwa tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
Perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan Usaha (*better business*)
Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan pendapatan (*better income*)
Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- d. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatn yang terbatas.
- e. Perbaikan kehidupan (*better living*)
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan Masyarakat (*better community*)
Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Disamping itu, dalam konteks sasaran pemberdayaan yaitu masyarakat yang lemah atau masyarakat yang tergolong masyarakat miskin atau masyarakat marginal. Menurut Schumacher dalam Sulistiyani (2004:90)

¹⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon

menjelaskan bahwa memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail jauh lebih tepat dari pada memberikan ikan.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa sasaran pemberdayaan lebih mengarah pada masyarakat marginal yang umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga seringkali tertinggal jauh dari masyarakat lain yang berpotensi lebih tinggi.

Selain itu, menurut Suhartini dkk, (2005) mengatakan bahwa sasaran penerima program pemberdayaan adalah warga kampung dengan kategori Keluarga miskin di mana penyusunan rencana kegiatan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya, ditentukan berdasarkan aspirasi dan dimusyawarkan oleh warga masyarakat kampung itu sendiri.

Dengan demikian dijelaskan bahwa sasaran pemberdayaan adalah golongan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, yang belum mampu mandiri secara ekonomi atau masyarakat marginal di perkotaan, di daerah pedesaan atau di manapun tempat yang terdapat masyarakat lemah ekonomi atau marginal yang perlu mendapat perhatian khusus agar dapat maju dan dapat mengembangkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D.3. Strategi Pemberdayaan

Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri. Menurut Mardikanto dkk, (2013:167) mengatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu ;

- a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat.
- c. Modernisasi melalui penjaminan arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalam kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dari uraian diatas dijealskan bahwa strategi pemberdayaan merupakan suatu cara dalam mengoptimalkan upaya-upaya pemberdayaan yaitu dengan cara mengangkat dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut dalam rangka memperbaiki taraf kehidupan.

Lebih lanjut, menurut Priyono (1996) dalam Mardikanto, dkk (2013:170) menetapkan 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari yaitu :

- a. Pengembangan sumber daya manusia
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok

¹⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon

- c. Pemupukan modal masyarakat (swasta)
- d. Pengembangan usaha produktif
- e. Penyediaan informasi tepat guna

Disisi lain, strategi pemberdayaan Suharto dalam Anwas (2014:66) mengatakan bahwa dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan yang dapat dilakukan menjadi 3 cara, yaitu:

- a. Aras mikro yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individual melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention.
- b. Aras mezzo yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan cara menggunakan kelompok sebagai media intervensi.
- c. Aras makro yaitu pendekatan yang disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.

Dengan demikian dijelaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat memerlukan berbagai strategi yang didukung dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta sebagaimana yang berkaitan dengan diusulkan atau yang dilaksanakan melalui program-program kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

D.4. Proses Pemberdayaan

Menurut Suharto dalam Anwas (2014:66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literature yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi itu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Selain itu, proses yang dilakukan untuk membuat program pemberdayaan berhasil mencapai tujuan, maka proses tersebut dilakukan berupa tahapan-tahapan pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004:82) mengatakan yaitu :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri;
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan;
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa dalam proses kegiatan pengembangan atau pemberdayaan harus disertai kesadaran bahwa tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar menambah pendapatan suatu kelompok saja tetapi juga untuk meningkatkan derajat seseorang juga.

Selain itu, dalam proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan menurut Rifa'i (2008:40) mengatakan yaitu :

- a. Setiap orang mengembangkan kesadaran awal sehingga mereka dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki kehidupannya dan memperoleh berbagai keterampilan yang memungkinkan mereka melaksanakan;
- b. Melalui pengambilan tindakan, mereka (masyarakat) mengalami keberdayaan dan kepercayaan dirinya meningkat;
- c. Karena adanya pertumbuhan keterampilan dan kepercayaan, setiap orang bekerja sama berusaha mempengaruhi keputusan dan sumberdaya yang mengakibatkan kesejahteraannya.

Disamping itu, sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yang dapat dilakukan yaitu :

- a. Tahapan penyadaran : dimana masyarakat diberi sebuah pencerahan dalam arti memberikan penyadaran bahwa mereka mampu untuk memiliki sesuatu dan bahwasanya mereka mempunyai kemampuan dan kapasitas yang luar biasa jika saja mereka mau mengeksplor dan menggali kemampuan dalam dirinya.
- b. Tahapan pengkapasitasan : tahapan dimana masyarakat yang diberdayakan diberikan program pempampuan untuk membuat mereka memiliki skil yang ada pada diri dan sumber daya yang dimiliki.
- c. Tahapan pemberi daya : pada tahapan ini mereka diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki atau kecakapan penerima.

Dengan demikian beberapa tahapan tersebut dijelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecendrungan yakni pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya. Kedua, kecendrungan sekunder yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog.

D.5. Pengertian Nelayan Pesisir

Nelayan pesisir adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Menurut Imron, (2003:5) mengatakan bahwa nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Sedangkan menurut Kusnadi (2009:27) mengatakan bahwa secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di daerah pantai untuk menangkap ikan diperlukan alat yang memadai misalnya : perahu, pancing, jala atau jaring.

Selain itu, menurut Sastrawidjaya (2002:6) mengatakan bahwa nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau pesisir.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi menangkap ikan (binatang air lainnya, tanaman air). Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, menyangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan.

Adapun klasifikasi nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok seperti :

- a. Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:
- b. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- c. Nelayan juragan, adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.
- d. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. (Mulyadi, 2007:26).

Dengan demikian dijelaskan bahwa nelayan yaitu suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama adalah memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di lautan, baik berupa ikan, udang, rumput laut, terumbu karang dan kekayaan laut lainnya. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya, yaitu karakteristik yang terbentuk dari kehidupan di lautan yang sangat keras dan penuh dengan resiko, terutama resiko yang berasal dari faktor alam.

D.6. Pemberdayaan Nelayan Pesisir

Pemberdayaan nelayan adalah upaya memberikan motivasi kepada mereka agar memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, dan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dan swasta sebagai pilar utama pembangunan untuk memperoleh suatu perubahan kualitas hidup yang lebih baik yang bersifat berkelanjutan. Menurut Arif Satria (2002:110) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan nelayan secara struktur maupun cultural perlu dipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan yang tentunya menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang unik pula. Namun, pendekatan yang unik pun tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh konteks kehidupan nelayan. Banyak variabel yang memberi pengaruh pada keunikan itu secara sosiologis maupun ekologis.

Selain itu, menurut Soloman dalam Hikam (2001:23) mengatakan bahwa tujuan proses pemberdayaan nelayan adalah untuk menolong supaya :

- a. Mendapatkan kembali eksistensi dan jati diri mereka dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi,
- b. Ilmu pengetahuan dan skill (keahlian dan keterampilan) pekerja sosial dapat digunakan klien secara optimal,
- c. Pekerja sosial sebagai mitra yang baik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya
- d. Struktur kekuasaan rumit dapat diubah menjadi terbuka agar dapat memberikan pengaruh pada kehidupan mereka.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa proses pemberdayaan nelayan dapat dilakukan jika ada sikap proaktif dari masyarakat nelayan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Sikap proaktif nelayan ini meliputi program perencanaan, pelaksanaan, hingga *monitoring* dan evaluasi, serta berperan dalam pengambilan keputusan karena proses pemberdayaan bertujuan untuk melakukan perubahan individu yang diikuti perubahan kelembagaan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, menurut Hikam (2001:25) menyatakan bahwa ada tiga tingkatan pelaksanaan pemberdayaan nelayan yang harus dilakukan berdasarkan tahapannya, yaitu:

- a. Pengalaman positif dalam keluarga untuk memberikan rasa percaya dan persaingan dalam interaksi sosial.
- b. Memaksa kemampuan mereka untuk mengatur kehidupan sosial dan menggunakan institusi sosial (sekolah) untuk memperoleh kompetensi,
- c. Mereka dapat menerima dan menampilkan nilai-nilai sosial.

Dengan demikian pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi maupun mempunyai mata pencaharian nelayan. Nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kekuatan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode yang bersifat mengemukakan fakta apa adanya, baik secara tertulis ataupun lisan, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, dengan kata lain penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan menjelaskan dan menganalisis tentang fenomena yang akan diteliti.

Yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah dilaksanakan pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. Dan mengambil informan kunci yaitu orang yang dianggap mengetahui atau terlibat langsung terhadap

implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.

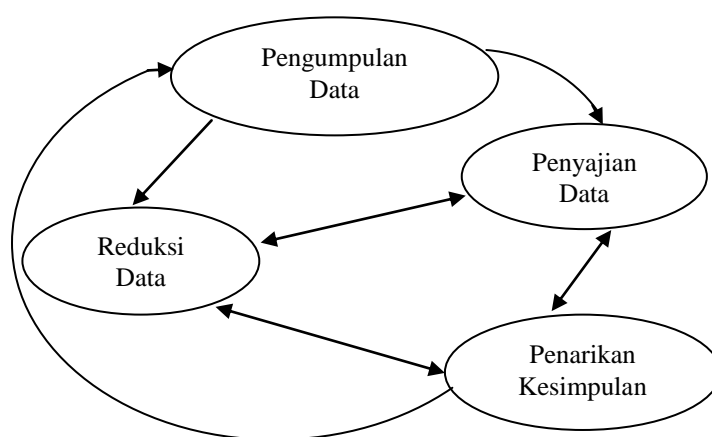
Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara
Merupakan teknik wawancara langsung yang dilakukan terhadap informan untuk menjaring data primer.
2. Observasi Tidak Terlibat
Dimaksudkan untuk mengamati berbagai aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Kepustakaan
Pengumpulan data melalui kepustakaan yang mengkaji berbagai buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisa data dari Miles dan Huberman (1984) yaitu :

1. Pengumpulan data; merupakan informasi baik dari data primer dan data sekunder.
2. Reduksi data; merupakan proses seleksi pemfokuskan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dalam catatan harian.
3. Penyajian data; merupakan serangkaian argumen informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Kalau data kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik atau sejenisnya.
4. Kesimpulan; merupakan suatu usaha menarik konklusi dari hal-hal yang ditemui dalam reduksi maupun penyajian data.

Gambar. 2
Model Analisa Data Miles dan Huberman



F. HASIL ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan gambaran menyangkut Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Pesisir Pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon, maka peneliti dapat melakukan observasi dilapangan yang kemudian dilakukan pendekatan dan wawancara kepada informan yang hasilnya dapat diuraikan dalam hasil penelitian ini. Adapun dalam variabel dalam penelitian diukur melalui beberapa dimensi sebagai berikut :

F.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia dalam usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para seseorang baik individu atau kelompok organisasi. Pengembangan sumber daya manusia adalah merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi seseorang agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan/atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan mengarah pada kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu para pekerja. Hal ini berkaitan dengan kelompok nelayan sering mengikuti program pelatihan pemberdayaan yang diadakan oleh pemerintah provinsi atau kota, maka dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan, ia mengatakan bahwa :

“Iya, kalau untuk program pelatihan dan pemberdayaan sudah dilakukan oleh pemerintah, dimana mendorong kelompok nelayan untuk aktif mengikuti kegiatan penyuluhan, pendampingan serta diberikan paket bantuan program pemberdayaan guna meningkatkan pengetahuan dan daya saing kelompok nelayan agar dapat sejajar dengan sektor perekonomian lainnya sehingga dengan begitu kelompok nelayan dapat melaksanakan aktivitas kegiatan kesehariannya dengan baik” (Wawancara, 12 Oktober 2020).

Selanjutnya, dilakukan pula pendekatan dan wawancara mengenai jenis-jenis program pelatihan pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah pada kelompok nelayan pesisir di desa waiheru, hal ini disampaikan oleh Kepala Desa, ia mengatakan bahwa :

“Kalau untuk jenis pelatihan yang dilakukan misalnya pelatihan dan penyuluhan melalui kerjasama dengan dinas perikanan dan kelautan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta tata cara dalam proses budidaya ikan berupa ikan air tawar dan ikan air laut, namun juga ada beberapa kegiatan pelatihan tersebut kurang diminati oleh kelompok nelayan, disebabkan karena kurang memiliki sosialisasi awal atau karena kurangnya bantuan fasilitas alat tangkap ikan atau bibit unggul yang disediakan sehingga membuat kelompok nelayan

masih ada yang beraktivitas dengan menggunakan kebiasaan yang bersifat tradisional” (Wawancara, 13 Oktober 2020).

Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai peran pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi atau kota dalam melakukan pengembangan pada kelompok nelayan pesisir, hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan Sekretaris Desa, ia mengatakan bahwa :

“Iya, kalau untuk peran pemerintah dapat dilakukan dalam 1 tahun sekali dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan kelompok nelayan termasuk salah satunya nelayan di desa waiheru, kegiatan pemberdayaan tersebut misalnya budidaya ikan air tawar, budidaya ikan mas, ikan nila dan ikan lele dan juga budidaya ikan air laut seperti ikan bubar dan ikan nener, disamping itu juga diberikan paket bantuan program pemberdayaan agar nelayan dapat meningkatkan aktivitasnya sesuai yang diharapkan” (Wawancara, 09 November 2020).

Disamping itu, dari pernyataan diatas mengenai pelatihan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah membuat kelompok nelayan pesisir menguasai secara teori maupun praktek dilapangan, hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan salah seorang Nelayan Pesisir ia mengatakan bahwa :

“Iya, untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan sudah dilakukan dengan tujuan agar para nelayan tidak hanya menguasai teori melainkan juga praktek misalnya kegiatan pelatihan budidaya ikan dan penyuluhan mengenai pembibitan dan penangkapan ikan dengan alat yang disediakan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para nelayan agar bekerja lebih efektif di tempat kerjanya, meskipun kadang ketersediaan bibit ikan masih kurang karena dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada” (Wawancara, 10 November 2020).

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia terhadap implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir menunjukkan belum optimal berupa kurangnya kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan pesisir, kurangnya penyediaan jenis pendampingan dan pelatihan program pemberdayaan, dan rendahnya peran dan perhatian pemerintah daerah setempat dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan kemampuan nelayan melalui berbagai kegiatan program pemberdayaan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kurang lancaran usaha produk bagi kelompok nelayan pesisir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

F.2. Pengembangan Kelompok

Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang menyatukan diri dan bekerjasama dalam mengatasi masalah dan tantangan dalam bidang sosial dan ekonomi yang tumbuhnya dan berkembang dari, oleh, dan untuk anggota dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kepentingan bersama anggota kelompok. Kelompok yang hidup dan berkembang mempunyai arah, sasaran dan tujuan yang jelas. Adapun yang menjadi tujuan kelompok adalah agar para anggota

¹⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon

secara bersama-sama saling membantu untuk memperbaiki taraf hidup berdasarkan kemampuan sendiri.

Pengembangan kelompok merupakan alternatif untuk mengejar keterlambatan pembangunan selama ini. Untuk itulah lembaga-lembaga penggerak pembangunan baik swasta maupun pemerintah mendorong bahkan menginstruksikan agar kelompok-kelompok musiman yang ada mulai dikembangkan menjadi kelompok yang berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan sejak berapa lama kelompok nelayan pesisir pada desa Waiheru di bentuk dan bagaimana perkembangannya sejak dibentuknya, maka dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Sekretaris Desa, ia mengatakan bahwa :

“Untuk pembentukan kelompok nelayan sudah dilakukan mulai pada tahun 2009, namun juga ada nelayan yang dibentuk bersifat mandiri atau perorangan, dan untuk nelayan perorangan atau mandiri ini biasanya mendapat bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya misalnya bantuan bibit atau alat tangkap ikan guna mempermudah kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, begitu juga kelompok nelayan lainnya yang masih aktif sampai saat ini mengembangkan usahanya” (Wawancara, 19 Oktober 2020).

Selanjutnya, dilakukan pula pendekatan dan wawancara mengenai jumlah jenis kelompok nelayan pesisir yang di bentuk pada desa Waiheru dan bagaimana perkembangannya, hal ini disampaikan oleh salah seorang Nelayan Pesisir ia mengatakan bahwa :

“Ya, untuk jumlah kelompok nelayan terdapat 8 (delapan) kelompok nelayan dengan jenis kelompok nelayan yaitu nelayan tangkap dan nelayan budidaya, untuk perkembangannya sampai saat ini masih tetap berjalan misalnya kelompok nelayan tangkap yang bekerja dengan menggunakan jaringan tangkap ikan dan alat pancing ikan, sedangkan untuk nelayan budidaya yang bekerja dengan bersifat membudidaya baik ikan air tawar maupun air laut” (Wawancara, 20 Oktober 2020).

Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai kelompok nelayan pesisir atau kelompok perorangan pernah mendapatkan bantuan berupa sarana dan prasarana alat tangkap ikan dari pemerintah daerah setempat, hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan salah seorang pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan, ia mengatakan bahwa :

“Iya, memang disadari bahwa untuk nelayan mandiri atau perorangan memang sering mendapat bantuan fasilitas dari pemerintah berupa bantuan alat tangkap ikan jarring, alat pancing, tali atau untuk nelayan budidaya diberikan bantuan bibit ikan dan bahan makanan ikan sebagai bentuk perawatan guna meningkatkan hasil produk yang dimiliki guna disalurkan kepada konsumen, karena itu nelayan dapat memenuhi kesejahteraan hidupnya” (Wawancara, 16 November 2020).

Disamping itu, dari pernyataan diatas mengenai ada peran dari pemerintah desa berupa bentuk koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan kepada kelompok nelayan pesisir,

hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan Kepala Desa, ia mengatakan bahwa :

“Kalau untuk peran pemerintah desa dalam mengkoordinasikan dengan pemerintah kota maupun provinsi sudah dilakukan menyangkut kegiatan program pemberdayaan kepada nelayan di desa guna membantu kelompok nelayan untuk meningkatkan usahanya melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, budidaya, serta kegiatan pengembangan lainnya agar kelompok nelayan dapat memiliki pengetahuan dan dapat mengembangkan produksi usahanya dengan baik sebagai bentuk mata pencaharian yang dilakukan sehari-hari” (Wawancara, 17 November 2020).

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengembangan kelompok terhadap implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir menunjukkan belum optimal berupa kurangnya penyediaan bantuan kepada kelompok nelayan pesisir, kurangnya jumlah kelompok nelayan yang tersedia, dan kurangnya peran dari pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan guna meningkatkan pengembangan kelompok nelayan dalam mewujudkan usaha produksi yang dimiliki, sehingga hal ini dapat mempengaruhi tingkat pengembangan kelompok dalam mewujudkan kelancaran usaha dan produksi budidaya yang dimiliki oleh kelompok nelayan.

F.3. Penyediaan Informasi

Penyediaan informasi adalah menyediakan sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Karena itu penyediaan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau di masa mendatang.

Selain itu penyediaan informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan saluran informasi dari kelompok nelayan kepada pemerintah daerah menyangkut pelaksanaan program pemberdayaan kelompok nelayan pesisir di desa ini, maka dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Sekretaris Desa, ia mengatakan bahwa :

“Iya, kalau untuk ketersediaan saluran informasi memang ada, biasanya dilakukan melalui ketua kelompok baik itu informasi menyangkut kebutuhan budidaya, pemberdayaan maupun informasi mengenai permasalahan yang dihadapi kelompok nelayan terhadap kegiatan yang dilakukan namun beberapa informasi tersebut disalurkan tidak semua terwujud dalam memberikan hasil yang dapat memuaskan para kelompok nelayan mengingat kurangnya ketersediaan akses untuk menghubungkan antara kelompok nelayan dan pemerintah daerah setempat” (Wawancara, 19 Oktober 2020).

¹⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon

Selanjutnya, dilakukan pula pendekatan dan wawancara mengenai bentuk informasi yang di miliki oleh kelompok nelayan pesisir dalam melaksanakan program pemberdayaan di desa, hal ini disampaikan oleh Kepala Desa, ia mengatakan bahwa :

“Memang ada beberapa bentuk informasi yang dimiliki oleh kelompok nelayan berupa informasi program pemberdayaan dari pemerintah kabupaten/kota atau provinsi dan pemerintah desa, karena penyampaian informasi tersebut bertujuan untuk mempermudah para kelompok nelayan melaksanakan kegiatan budidaya, juga melalui informasi para nelayan pesisir dapat mengikuti beberapa program pemberdayaan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki ketika melaksanakan kegiatan pembudidayaan nantinya” (Wawancara, 20 Oktober 2020).

Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai upaya kelompok nelayan pesisir dalam mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan akses terhadap program pemberdayaan kelompok nelayan., hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan salah seorang pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan, ia mengatakan bahwa :

“Kalau upaya dalam mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan akses tentu sudah dilakukan meskipun tidak semua memberikan hasil yang cukup baik, misalnya selain memberikan akses kemudahan bagi kelompok nelayan dalam mengikuti program pemberdayaan juga dilakukan kegiatan pengembangan kelompok nelayan guna meningkatkan hasil usaha produksi yang dimiliki oleh para nelayan sehingga dengan begitu dapat memiliki nilai jual atau nilai tawar dengan memiliki keuntungan ekonomis yang tinggi” (Wawancara, 23 November 2020).

Disamping itu, dari pernyataan diatas mengenai informasi seperti apa saja yang dimiliki oleh kelompok nelayan pesisir agar dapat meningkatkan kegiatan pemberdayaan di desa ini, hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan salah seorang Nelayan Pesisir, ia mengatakan bahwa :

“Untuk informasi yang dimiliki oleh kelompok nelayan pesisir biasa seperti penyediaan kegiatan program pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, tata cara pembibitan, informasi mengenai kegiatan program pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota atau provinsi yang kemudian disampaikan oleh pemerintah desa kepada kelompok nelayan pesisir, dengan begitu informasi tersebut bersifat terbuka dan diterima langsung oleh kelompok nelayan pesisir sebagai pelaksana kegiatan pembudidayaan” (Wawancara, 24 November 2020).

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa penyediaan informasi terhadap implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir menunjukkan belum optimal berupa kurangnya ketersediaan saluran informasi dan bentuk informasi yang dimiliki oleh nelayan pesisir, kurangnya upaya nelayan dalam mendorong akses informasi kepada pemerintah daerah dan kurangnya

¹⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon

penyediaan informasi dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan yang dimiliki oleh nelayan pesisir, sehingga hal ini dapat mempengaruhi tingkat kemampuan kelompok nelayan dalam meningkatkan usaha produksinya.

F.4. Pengembangan Usaha Produk

Pengembangan usaha produk adalah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan dalam menghadapi perubahan suatu produk yang lebih baik, sehingga dapat memberikan daya guna maupun daya pemuas yang lebih besar. Selain itu, setiap usaha produk harus mengembangkan produk baru untuk membentuk masa depan usaha. Produk yang telah diperbaiki dan produk pengganti harus diciptakan untuk mempertahankan atau memperbesar penjualan. Jika penjualan produk naik maka keuntungan usaha pula naik.

Oleh karena itu, pengembangan usaha produk dilakukan sebagai langkah strategis untuk membuat produk baru dengan sasaran pasar yang baru untuk mengejar pertumbuhan perusahaan menuju ke arah yang lebih baik. Pada setiap waktu tertentu perusahaan akan melaksanakan berbagai program untuk mencapai berbagai sasaran pengembangan produk yang berlainan. Hal ini berkaitan dengan upaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok nelayan pesisir dalam pengembangan usaha produknya di desa ini, maka dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Desa, ia mengatakan bahwa :

“Iya selama ini, memang dapat diakui bahwa proses pengembangan usaha produk memiliki kendala yang dihadapi oleh nelayan pesisir, misalnya masalah minimnya pengetahuan para nelayan pesisir terhadap teknik pembibitan yang baik meskipun sudah dilakukan pelatihan dan penyuluhan juga karena kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kebutuhan budidaya bagi nelayan pesisir guna mengembangkan usaha produknya walaupun sebagian sudah diberikan berupa bantuan dari pemerintah, sehingga hal tersebut menimbulkan kekurang lancaran dalam mengembangkan usaha produk bagi nelayan pesisir” (Wawancara, 12 Oktober 2020).

Selanjutnya, dilakukan pula pendekatan dan wawancara mengenai strategi yang digunakan dalam mengembangkan usaha produk yang dimiliki kelompok nelayan pesisir di desa, hal ini disampaikan oleh salah seorang Nelayan Pesisir ia mengatakan bahwa :

“Iya, kalau untuk strategi dalam mengembangkan usaha produk bagi nelayan pesisir selama ini memang ada, namun semua itu juga membutuhkan modal guna penyediaan pembibitan, penyediaan lahan, dan peralatan untuk mencukupi kebutuhan pengembangan usaha produk nelayan pesisir, disamping itu kegiatan pelatihan dan penyuluhan juga perlu dilakukan sebagai wujud peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki nelayan pesisir guna meningkatkan usaha produk yang dimilikinya” (Wawancara, 13 Oktober 2020).

Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai tingkat kemampuan yang dimiliki kelompok nelayan dalam meningkatkan hasil usaha produknya di

desa ini, hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan salah seorang pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan, ia mengatakan bahwa :

“Memang disadari bahwa sejauh ini untuk tingkat kemampuan yang dimiliki oleh kelompok nelayan pesisir masih terlihat kurang dalam meningkatkan usaha produksinya sehingga diperlukan adanya pelibatan pemerintah daerah dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan guna mengadakan kegiatan pemberdayaan kepada nelayan pesisir berupa pelatihan, penyuluhan, tata cara pembibitan, penyediaan bibit unggul dan alat tangkap ikan guna meningkatkan kemampuan usaha produk nelayan pesisir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kelompok nelayan pesisir” (Wawancara, 09 November 2020).

Disamping itu, dari pernyataan diatas mengenai upaya kelompok nelayan pesisir dalam membuka akses pemasaran terhadap hasil usaha produk yang dimiliki di desa ini, hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan Sekreatris Desa, ia mengatakan bahwa :

“Iya, kalau untuk upaya dari kelompok nelayan untuk membuka akses pemasaran sudah dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah yakni dilakukan pelatihan, penyuluhan, penyediaan bibit untuk budidaya, pemberian bantuan alat tangkap ikan untuk kebutuhan nelayan pesisir agar dengan mudah mengelola usaha produksinya dengan begitu dapat meningkatkan kualitas hasil dari produksi yang dimilikinya oleh para nelayan pesisir dan dapat diakses oleh konsumen melalui penjualan pasar lokal, untuk itu dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan” (Wawancara, 10 November 2020).

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengembangan usaha produk terhadap implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir menunjukkan belum optimal berupa kurangnya upaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan pesisir, kurangnya strategi yang digunakan untuk mengembangkan usaha produk, kurangnya tingkat kemampuan yang dimiliki nelayan pesisir dan kurangnya upaya kelompok nelayan pesisir dalam membuka akses pemasaran usaha produk. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dimiliki oleh nelayan pesisir guna mengembangkan usahanya yang efektif dan efisien.

F.5. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisa data diatas terlihat dengan jelas bahwa tinggi rendahnya pemberdayaan nelayan pesisir pada suatu daerah termasuk di desa Waiheru kecamatan Baguala kota Ambon, juga sangat ditentukan pula oleh implementasi program yang dilakukan di daerah tersebut, hal ini dapat didukung berdasarkan pendapat beberapa para ahli menurut Agustino (2014:124) mengatakan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2007:237) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk

tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Oleh karena itu implementasi merupakan proses pelaksanaan dari suatu program, baik itu di lingkungan pemerintah, masyarakat, organisasi yang hasilnya dapat di lihat dari perbandingan pencapaian target dengan tujuan awal, sehingga dalam implementasi ini sangat dimungkinkan banyak hal yang sifatnya teknis sebagai upaya dari pencapaian tujuan tersebut.

Disamping itu, dalam konteks pemberdayaan menurut Rahman Mulyawan (2016:45) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan alternatif atau pembangunan sosial yang bertujuan menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan. Sedangkan menurut Sipahelut, (2010:2) mengatakan bahwa pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, dimana pemberdayaan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Dengan demikian pemahaman tentang pemberdayaan nelayan tidak terlepas dari konteks keberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program atau bantuan, akan tetapi membuat masyarakat memiliki keyakinan yang lebih besar akan kemampuan dirinya baik dilakukan melalui beberapa aspek penting yaitu : (a) pengembangan sumber daya manusia, (b) pengembangan kelompok, (c) penyediaan informasi, dan (d) pengembangan usaha produk, dengan begitu masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pesisir laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat disandingkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain, seperti sector pertanian, sector perindustrian dan lain-lain. Upaya pemberdayaan sangat diperlukan didalam mendongkrak persoalan-persoalan yang ada di masyarakat pesisir (nelayan) sebagai upaya meningkatkan kehidupan nelayan dalam sector perekonomian termasuk pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon, sebagai salah satu wilayah pesisir laut, memiliki potensi yang sangat baik dalam meningkatkan potensi kelautan yang ada sehingga hal ini dapat digunakan dan

dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan untuk dijadikan sebagai mata pencharian dalam meningkatkan kehidupan sehari-sehari.

G. PENUTUP

G.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan penulis sebelumnya mengenai implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon, maka dapat disimpulkan dari pendekatan dan hasil wawancara Informan terhadap indikator-indikator yaitu:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari hasil analisa penelitian mengenai pengembangan sumber daya manusia terhadap implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir menunjukkan belum optimal berupa kurangnya kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan pesisir, kurangnya penyediaan jenis pendampingan dan pelatihan program pemberdayaan, dan rendahnya peran dan perhatian pemerintah daerah setempat dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan kemampuan nelayan melalui berbagai kegiatan program pemberdayaan

2. Pengembangan Kelompok

Dari hasil analisa penelitian mengenai pengembangan kelompok terhadap implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir menunjukkan belum optimal berupa kurangnya penyediaan bantuan kepada kelompok nelayan pesisir, kurangnya jumlah kelompok nelayan yang tersedia, dan kurangnya peran dari pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan guna meningkatkan pengembangan kelompok nelayan dalam mewujudkan usaha produksi yang dimiliki.

3. Penyediaan Informasi

Dari hasil analisa penelitian mengenai penyediaan informasi terhadap implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir menunjukkan belum optimal berupa kurangnya ketersediaan saluran informasi dan bentuk informasi yang dimiliki oleh nelayan pesisir, kurangnya upaya nelayan dalam mendorong akses informasi kepada pemerintah daerah dan kurangnya penyediaan informasi dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan yang dimiliki oleh nelayan pesisir.

4. Pengembangan Usaha

Dari hasil analisa penelitian mengenai pengembangan usaha produk terhadap implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir menunjukkan belum optimal berupa kurangnya upaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan pesisir, kurangnya strategi yang digunakan untuk mengembangkan usaha produk, kurangnya tingkat kemampuan yang dimiliki nelayan pesisir dan kurangnya upaya kelompok nelayan pesisir dalam membuka akses pemasaran usaha produk.

G.2. Saran - Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir

pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon, maka peneliti dapat mencoba memberikan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Perlunya Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai lembaga yang bertindak sebagai fasilitator dalam program pemberdayaan nelayan harus lebih sering melakukan penyuluhan atau pelatihan guna mengembangkan pengetahuan dan kemampuan kelompok nelayan pesisir.
2. Perlunya kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan yang selanjutnya akan dilakukan sebaiknya jangan hanya dilakukan di satu desa, namun di lakukan di setiap desa yang ada di kecamatan.
3. Perlunya pembuatan industri rumahan di kawasan pesisir sebagai alternatif pekerjaan lain bagi para nelayan terutama kepada ibu rumah tangga yang memang sehari-hari hanya diam di rumah, dengan adanya industri rumahan ini dapat menyumbang pendapatan, minimal bagi keluarga nelayan pesisir itu sendiri.
4. Perlunya pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana seperti tempat pelabuhan ikan dan pabrik-pabrik es guna meningkatkan usaha produksi bagi nelayan pesisir.

Demikian kesimpulan dan saran yang peneliti paparkan diatas, diharapkan semoga bisa mempersentasikan hasil penulisan skripsi ini dan menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari terutama bagi pihak yang melakukan penelitian lanjutan dengan judul yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan*. Alfabeta CV : Bandung.
- Arif Satria. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Pustaka Cidesindo : Jakarta.
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. ALFABETA. CV : Bandung.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama : Bandung.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Hikam. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Pustaka Pelajar : Jakarta.
- Imron. 2003. *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial*. Penerbit PT. Gramedia : Jakarta.
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Ar- Ruzz Media : Yogyakarta.
- Mardikanto dkk., 2013. *Memberdayakan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Mulyadi. 2007. *Ekonomi Kelautan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta.

- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo : Jakarta.
- Oemar Hamalik, 2007. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Rahman Mulyawan, 2016. *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. Unpad Press : Bandung.
- Rifa'i, Achmad. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal* : UNNES.
- Sadhana, Kridawati. 2013. *Realitas Kebijakan Publik*. Cetakan Ketiga, UM Press : Malang.
- Sastrawidjaya. 2002, *Nelayan dan Kemiskinan*, Penerbit Pradnya Paramita : Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Penerbit Gava Media : Yogyakarta.
- Sipahelut, Michel. 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis. IPB. Bogor.
- Theresia, Aprillia dkk., 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta : Bandung.
- Wahab, 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Widodo, Joko, 2014. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing : Malang.